



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Kalsum Komaryani, MPPM
Jabatan : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

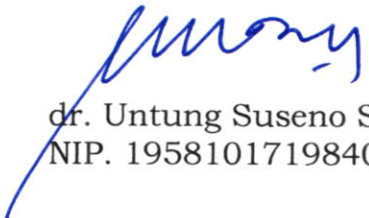
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Desember 2017

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004


dr. Kalsum Komaryani, MPPM
NIP. 196301171988032002

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Tahun : 2018

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Perumusan pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN yang ditetapkan | 1. Jumlah pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN | 2 |
| 2 | Perumusan pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung upaya promotif dan preventif di puskesmas | 2. Jumlah Pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung upaya promotif dan preventif di puskesmas | - |
| 3 | Skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dibidang kesehatan | 3. Jumlah skema pembiayaan melalui PPP kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang kesehatan yang dihasilkan | - |
| 4 | Dihasilkannya bahan kebijakan teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 4. Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS 5. Jumlah dokumen hasil <i>Health Technology Assessment</i> (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan | 5 2 |

Kegiatan

Pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS

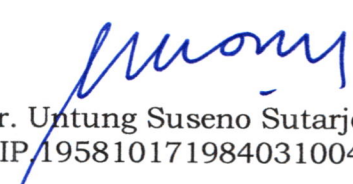
Anggaran

Rp. 25.552.277.623.000,-

Jakarta, 8 Desember 2017

Sekretaris Jenderal

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kes.


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes.
NIP. 195810171984031004


dr. Kalsum Komaryani, MPPM
NIP. 196301171988032002